SUPLEMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2015



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2015

DAFTAR ISI

BAB 1 TEMA PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO 1-1
1.1 Pengantar 1-1
1.2 Landasan Hukum 1-1
1.3 Tema Pembangunan Tahun 2015 1-2
1.4 Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2015 1-4
1.4.1 Lingkungan Eksternal Dan Internal Tahun 2015 1-4
1.4.2 Tantangan Dan Kebijakan Pokok 1-5
1.4.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro 1-6
1.4.4 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2015 1-6
1.4.5 Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Investasi 1-6
1.4.6 Moneter 1-7
1.4.7 Neraca Pembayaran 1-8
1.4.8 Perbankan dan Pasar Modal 1-9
1.4.9 Pengangguran dan Kemiskinan 1-9
BAB 2 PERKUATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2-1

DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2010-2013 (%) 1-9

TABEL 1.2 SASARAN PERTUMBUHAN DAN SUSUNAN STRUKTUR EKONOMI 2014 - 2015 (%) 1-10

TABEL 1.3 PERKIRAAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2014-2015 (USD MILIAR) 1-11

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL.....2-2

BAB 1
TEMA PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO

1.1 PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (RKP 2015) disusun pada tahun 2014 oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RKP 2015 telah digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN Tahun 2015 yang disahkan menjadi UU no. 27/2014 tentang APBN 2015.

Visi Misi dan Program Aksi Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dilaksanakan mulai tahun 2015. Untuk itu, APBN 2015 disesuaikan untuk memastikan bahwa Visi Misi Presiden dilaksanakan mulai tahun 2015.

Penyusunan RAPBN-Perubahan 2015, menurut peraturan yang berlaku berpe-doman pada RKP 2015 yang juga telah disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019., yang selanjutnya disebut dengan RKP 2015 – Perubahan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa:

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghin-darkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

(2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

Penjelasan pasal 5 tersebut untuk masing-masing ayat adalah sebagai berikut:

(1) Yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama adalah RKP dan RAPBN tahun 2010, 2015, 2020, dan 2025.

(2) Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-P).

Dengan demikian, penyusunan RKP 2015 Perubahan oleh Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 yang disarikan menjadi Trisakti, yaitu:

1. **Berdaulat dalam politik** yang diwujudkan melalui pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong dan persatuan bangsa.
2. **Berdikari dalam ekonomi** yang diwujudkan melalui pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Negara memiliki karakter kebijakan dan kewibawaan pemimpin yang kuat dan berdaulat dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi rakyat melalui penggunaan sumber daya ekonomi nasional dan anggaran negara untuk memenuhi hak dasar warga negara.
3. **Berkepribadian dalam kebudayaan** yang diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotong-royongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implemen-tasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi Indonesia masa depan.

Selanjutnya Trisakti menjadi dasar penyusunan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 adalah:

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Sebagai awal pelaksanaan visi misi di atas, pembangunan tahun 2015 diarahkan sebagai tahap penguatan fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yaitu:

(1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;

(2) Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;

(3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;

(4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;

(5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;

(6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;

(7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;

(8) Melakukan revolusi karakter bangsa; dan

(9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Masing-masing agenda dijabarkan menurut prioritas-prioritas yang dilengkapi dengan uraian sasaran, arah kebijakan dan strategi.

1.4 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2015

1.4.1 LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN INTERNAL TAHUN 2015

Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Pertama, integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015. Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.

Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain berasal dari: (a) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan negara industri maju lainnya yang diperkirakan masih tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (b) perekonomian Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri di Asia

lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Ketiga, Terdapat tiga perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015, yaitu: (a) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor Indonesia tumbuh lebih cepat; (b) harga komoditas dunia masih masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya indikasi berakhirnya era *supercycle* akan mempengaruhi ekspor dan investasi Indonesia; (c) rencana akan berakhirnya stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014 dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong naiknya biaya untuk mengakses modal internasional.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2015.

1.4.2 TANTANGAN DAN KEBIJAKAN POKOK

Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok yang dihadapi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. **MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL.** Perhatian akan di tujukan pada industri-industri (berdasarkan PDB dengan tahun dasar 2010, sebutan sektor diubah menjadi industri) strategis ekonomi domestik yang akan lebih digiatkan dengan prioritas pada kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulataan energi serta upaya untuk mendorong industri

pengolahan dan pariwisata, peningkatan investasi dan daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi;

2. **MENJAGA STABILITAS EKONOMI**. Dorongan akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun non-migas, serta pengendalian arus modal;
3. **MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN.** Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat dan terpadu.

1.4.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2015 diarahkan sejalan dengan visi Presiden untuk pemerintahan tahun 2015-2019 yaitu "TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG." Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada periode tersebut.

1.4.4 Sasaran Kebijakan Ekonomi Makro 2015

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga, sasaran Kuantitatif tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar 5,5–5,8 persen dan tingkat kemiskinan menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.

1.4.5 Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Investasi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 persen, lebih tinggi dari

perkiraan pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,1 persen.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 8,1 persen dan 2,1 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 1,5 persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi rumah tangga diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen, sedangkan konsumsi lembaga non profit rumah tangga (LNPRT) diperkirakan tumbuh sekitar 7,0 persen.

Dari sisi lapangan usaha, dengan menggunakan PDB dengan tahun dasar 2010, industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh sekitar 4,1 persen, industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 6,1 persen dan industri pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 1,8 persen. Industri tersier yaitu pengadaan listrik, gas; pengadaan air; konstruksi;perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyedia akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya sebesar 5,6 persen; 5,3 persen; 6,4 persen; 4,9 persen; 8,1 persen; 5,7 persen; 9,7 persen; 8,8 persen; 6,8 persen; 9,1 persen; 1,4 persen; 8,8 persen; 6,9 persen; dan 6,7 persen.Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,8 persen pada tahun 2015 membutuhkan investasi sebesar Rp 4.007,3 triliun.

1.4.6 Moneter

Arah kebijakan di bidang moneter akan tetap difokuskan pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya. Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 5,0 persen, sementara itu nilai tukar diperkirakan sebesar Rp 12.200 per dolar AS.

Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan didorong agar diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur

dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan (*financial inclusion*).

Beberapa hal penting terkait implementasi kebijakan moneter ke depan, diantaranya: (i) Pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (ii) Kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan (iii) Komunikasi yang intensif antara BI dan Pemerintah dengan masyarakat sangat penting untuk menjangkar persepsi pasar; (iv) Penguatan kebijakan struktural sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.

1.4.7 Neraca Pembayaran

Penerimaan ekspor tahun 2015 diperkirakan meningkat sekitar 7,8 persen, didorong oleh peningkatan ekspor non-migas yang naik sekitar 8,0 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 6,8 persen, didorong oleh peningkatan impor non-migas yang naik sekitar 6,1 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2015 diperkirakan defisit sebesar USD29,1 miliar.

Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD36,6 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD19,9 miliar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD11,9 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan surplus sebesar USD4,8 miliar.

Secara keseluruhan, terjadi surplus neraca pembayaran pada tahun 2015 yang diperkirakan mencapai USD7,5 miliar sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai USD119,9 miliar.

1.4.8 Perbankan dan Pasar Modal

Dalam tahun 2015, setelah terselenggaranya pemilihan anggota DPR/DPD, Presiden dan Kabinet yang baru diharapkan dapat lebih mendorong harapan atau ekspektasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Dengan menurunnya inflasi dan suku bunga perbankan dalam tahun 2015, pertumbuhan kredit perbankan diperkirakan akan meningkat lagi, demikian pula dengan penerbitan dan perdagangan obligasi dan saham di bursa efek Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan surat berharga dalam tahun 2015 masih terbatas. Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan di pasar modal serta sistim perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya perkembangan pasar keuangan di dalam negeri.

1.4.9 Pengangguran dan Kemiskinan

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai kegiatan pembangunan diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Sasaran kuantitatif, pada tahun 2015 tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,8 persen dan tingkat kemiskinan diperkiran menjadi 9,5-10,5 persen.

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2010-2013 (%)

Uraian	2010	2011	2012	2013
Pertumbuhan Ekonomi	6,2	6,5	6,3	5,8
Sisi Pengeluaran				
Konsumsi Masyarakat	4,7	4,7	5,3	5,3
Konsumsi Pemerintah	0,3	3,2	1,3	4,9
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	8,5	8,3	9,7	4,7
Ekspor Barang dan Jasa	15,3	13,6	2,0	5,3
Impor Barang dan jasa	17,3	13,3	6,7	1,2
Sisi Produksi				
Pertanian	3,0	3,4	4,2	3,5
Pertambangan dan Penggalian	3,9	1,6	1,6	1,3
Industri pengolahan	4,7	6,1	5,7	5,6
Listrik Air dan Gas Bersih	5,3	4,7	6,2	5,6
Konstruksi	7,0	6,1	7,4	6,6

Uraian	2010	2011	2012	2013
Perdagangan, Hotel dan restoran	8,7	9,2	8,1	5,9
Pengangkutan Dan Komunikasi	13,4	10,7	10,0	10,2
Keuangan, persewaan dan jasa usaha	5,7	6,8	7,1	7,6
Jasa-Jasa	6,0	6,8	5,2	5,5
Laju Inflasi (persen)	7,0	3,8	4,3	8,4
Pengangguran terbuka (Persen)*) - Agustus	7,4	6,8	6,2	5,8
Penduduk Miskin (Persen)	13,3	12,49	11,46	11,37

Ket: *) Agustus 2012-2013 merupakan hasil backcasting dari penimbang proyeksi penduduk
**)Berdasarkan PDB tahun dasar 2000

TABEL 1.2
SASARAN PERTUMBUHAN DAN SUSUNAN STRUKTUR EKONOMI 2014-2015 (%)

Indikator	Perkiraan 2014	Proyeksi 2015
Pertumbuhan PDB	5,1	5,8
Sisi Pengeluaran		
Konsumsi Rumah Tangga	5,2	5,3
Konsumsi Lembaga Non Profit untuk Rumah Tangga (LNPRT)	6,9	7,0
Konsumsi Pemerintah	2,4	1,3
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	4,9	8,1
Ekspor Barang dan Jasa	-0,7	2,1
Impor Barang dan Jasa	-3,6	1,5
Sisi Produksi		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,9	4,1
Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,8
Industri Pengolahan	4,7	6,1
Pengadaan Listrik, Gas	5,0	5,6
Pengadaan Air	4,2	5,3
Konstruksi	6,0	6,4
Perdagangan besar dan eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,5	4,9
Transportasi dan Pergudangan	6,9	8,1
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	5,1	5,7
Informasi dan Komunikasi	9,1	9,7
Jasa keuangan	8,2	8,8
Real Estate	6,3	6,8
Jasa Perusahaan	8,7	9,1

Indikator	Perkiraan	Proyeksi
	2014	2015
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,6	1,4
Jasa Pendidikan	7,3	8,8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,6	6,9
Jasa lainnya	6,1	6,7
Distribusi PDB (%)		
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,3	13,2
Industri Pengolahan	20,7	20,8
Lainnya	66,0	66,0

Ket: *) Berdasarkan PDB tahun dasar 2010

TABEL 1.3
PERKIRAAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2014-2015 (USD MILIAR)

Indikator	Perkiraan	Proyeksi
	2014	2015
Ekspor		
Migas	32,9	32,3
Nonmigas	145,2	156,7
(Pertumbuhan, %)	-1,0	8,0
Impor		
Migas	-46,1	-48,9
Nonmigas	-131,6	-139,6
(Pertumbuhan, %)	-1,0	6,1
Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah	-2,8	-2,9
Transaksi Berjalan	-28,2	-29,1
Neraca Arus Modal		
Pemerintah		
Arus Masuk	-2,4	-2,0
Arus Keluar	12,5	12,5
Swasta		
PMA Neto	17,3	19,9
Portofolio	2,2	2,3

Indikator	Perkiraan	Proyeksi
	2014	2015
Lainnya	3,2	3,9
Surplus/Defisit		
(Overall Balance)	4,5	7,5
Cadangan Devisa	112,4	119,9
(Dalam Bulan Impor)	6,4	6,4

BAB 2
PERKUATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran jangka menengah yang diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019, perlu dilakukan perkuatan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2015, sebagai langkah awal pelaksanaan RPJMN 2015 – 2019.

Penyiapan langkah perkuatan didasarkan pada strategi pembangunan nasional dengan norma – norma pembangunan yaitu membangun manusia dan masyarakat, mengupayakan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, dan produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan, memberikan perhatian khusus pada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah – bawah tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan pelaku – pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan, aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Seluruh norma pembangunan menjadi acuan pembangunan nasional untuk menuju Indonesia yang lebih baik.

Selanjutnya perkuatan kebijakan pembangunan nasional di tahun 2015 akan difokuskan pada 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pemerataan dan kewilayahan, pemenuhan kondisi perlu dan pelaksanaan *quick wins* dan program lanjutan.

GAMBAR 2.1
STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL



Pembangunan manusia utamanya akan difokuskan pada pemenuhan kewajiban dasar yaitu pembangunan pendidikan, kesehatan serta pembangunan perumahan, air minum dan sanitasi. Hal ini dikarenakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sebagai modal utama pembangunan tidak akan tercapai jika tidak ditunjang dengan peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan manusia yang unggul dan berdaya saing dalam menghadapi persaingan global. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positip dan konstruktif. Penyediaan perumahan, air minum dan sanitasi yang layak juga diperlukan untuk memastikan terpenuhinya infrastruktur dasar yang mendukung pembangunan manusia yang berkualitas.

Pembangunan sektor unggulan diarahkan pada perkuatan kedaulatan pangan dengan meningkatkan produksi dalam

negeri dan meningkatan kemandirian ekonomi. Pangan merupakan hal utama yang harus dipenuhi. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang tinggi menuntut adanya penjaminan pangan yang cukup tersedia dari produksi dalam negeri baik dalam kuantitas maupun kualitas. Untuk itu kedaulatan pangan diperlukan untuk menjamin terpenuhinya pangan secara mandiri melalui peningkatan produksi dalam negeri. Selain itu, pembangunan sektor unggulan juga ditujukan untuk meningkatkan penggunaan sumber daya energi untuk pemenuhan kebutuhan lokal mendukung perekonomian nasional dan akses energi bagi masyarakat.

Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan juga merupakan sektor unggulan yang akan diperkuat di tahun 2015. Pembangunan kemaritiman sangat penting mengingat Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan hasil laut. Untuk itu pembangunan ekonomi maritim dan kelautan akan difokuskan pada menghubungkan pulau – pulau melalui jaringan lalu lintas nasional atau Tol Laut dan meningkatkan komoditi hasil laut. Fokus selanjutnya dari perkuatan pembangunan sektor unggulan yaitu peningkatan daya saing pariwisata dan pengembangan wilayah industri. Hal ini mengingat kedua sektor ini memegang peranan penting untuk menggerakan perekonomian serta dapat meningkatan pendapatan nasional.

Perkuatan kebijakan pembangunan nasional melalui pengurangan kesenjangan antar pendapatan dan antar wilayah (pemerataan dan antar wilayah) akan difokuskan pada pengembangan sistem perlindungan sosial, pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, pemberian pelatihan dasar bagi pengembangan kewirausahaan dan perbaikan pendataan masyarakat miskin, serta pembangunan wilayah perdesaan dan perbatasan. Pembangunan pada intinya adalah agregasi dari pembangunan daerah terutama pembangunan desa, wilayah perbatasan dan terpencil lainnya. Untuk itu pembangunan harus dimulai dari pinggir dan dari pedesaan, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai dan dapat mengurangi kesenjangan secara menyeluruh. Selain itu diperlukan juga peningkatan berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi untuk memberikan akses yang sama bagi masyarakat terutama masyarakat miskin dan rentan.

Aspek pemerataan ini juga didukung oleh pembangunan infrastruktur konektivitas nasional difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar antar pulau. Pengintegrasian secara domestik ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi serta meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa antar wilayah di Indonesia.

Selain itu juga dilakukan perkuatan pada beberapa kegiatan yang akan mendukung pencapaian tiga dimensi pembangunan tersebut yaitu perkuatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi serta pelaksanaan *quick wins* dan program lanjutan lainnya.

Perkuatan tidak hanya memanfaatkan tambahan ruang fiskal yang ada namun juga dapat berasal dari penajaman dari pagu yang telah ada di tahun 2015. Perkuatan dengan memanfaatkan tambahan ruang fiskal akan bersifat terbatas yang artinya hanya dilakukan pada beberapa program dan kegiatan prioritas tertentu. Hal ini diharapkan agar perkuatan ini dapat lebih fokus dan efektif dalam mencapai sasarannya.

Seluruh rencana perkuatan yang dilakukan pada beberapa prioritas pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik bagi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional selanjutnya dalam RPJMN 2015 – 2019. Sehingga sasaran – sasaran pembangunan nasional dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejateraan serta bermanfaat bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

A. DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

1. PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Sasaran

Pembangunan pendidikan yang berkualitas berperan penting untuk melahirkan SDM yang bermutu, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terampil, dan berdaya saing. Dalam tahun 2015, upaya meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas antara lain akan dilaksanakan melalui wajib belajar 12 Tahun, yaitu untuk memenuhi hak seluruh penduduk terhadap pelayanan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan peningkatan akses pendidikan menengah yang berkualitas.

Sasaran pembangunan pendidikan dalam tahun 2015 adalah tercapainya APM SD/SDLB/MI sebesar 91,23 persen; APK SMP/SMPLB/MTs sebesar 102,8 persen, dan APK SMA/SMALB/SMK/MA sebesar 82,42 persen. Sementara itu, Angka melanjutkan lulusan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA diharapkan meningkat menjadi 80,0 persen.

Untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 Tahun, dalam tahun 2015 akan disediakan bantuan bagi anak usia 7 sampai 18 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk dapat bersekolah melalui penyediaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kartu Indonesia Pintar bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi anak usia sekolah/siswa kurang mampu agar memperoleh akses pelayanan pendidikan yang berkualitas, mencegah angka putus sekolah dan menarik siswa kurang mampu untuk bersekolah kembali, dan membantu siswa kurang mampu memenuhi kebutuhan personal dalam kegiatan pendidikan, antara lain pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll), biaya transportasi ke sekolah, uang saku siswa, dan lainnya.

Strategi Perkuatan

Perkuatan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung Wajib Belajar 12 Tahun adalah:

a. Cakupan Kartu Indonesia Pintar yang merupakan lanjutan dari Bantuan Siswa Miskin akan bertambah, yaitu yang semula 13 persen Rumah Tangga (RT) Miskin (RAPBN 2015) meningkat menjadi 25 persen RT miskin.

b. Anak usia 7-18 Tahun yang akan mendapatkan KIP bertambah, yaitu yang semula sebanyak 11.148.227 siswa yang bersekolah (RAPBN 2015), menjadi sebanyak 21.678.881 siswa.

c. Alokasi KIP menurut jenjang dan jenis pendidikan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

    1) SD/SDLB: semula 6.046.920 siswa menjadi 10.685.614 siswa

    2) MI/Ula: semula 826.467 siswa menjadi 877.992 siswa

3) SMP/SMPLB: semula 2.169.890 siswa menjadi 4.694.968 siswa

4) MTs/Wustha: semula 773.491 siswa menjadi 1.020.616 siswa

5) SMA/SMALB/SMK: semula 975.030 siswa menjadi 3.846.726 siswa

6) MA/Ulya: semula 356.429 siswa menjadi 552.965 siswa.

2. PEMBANGUNAN KESEHATAN

Sasaran

Pembangunan Kesehatan diutamakan pada pemantapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta penyediaan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan. Pada tahun 2015 direncanakan akan dilakukan perluasan cakupan pelayanan jaminan kesehatan melalui KIS serta peningkatan akses pelayanan dasar dan rujukan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang meliputi peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit rujukan nasional dan rumah sakit rujukan regional.

Strategi Perkuatan

Strategi perkuatan di tahun 2015 akan diutamakan untuk mencapai sasaran utama antara lain:

a. Peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan melalui Kartu Indonesia Sehat dengan meningkatkan Penerima Bantuan Iuran yaitu penambahan peserta menjadi 88,2 juta jiwa antara lain tambahan 1,8 juta orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi kelompok masyarakat miskin, rentan miskin, serta tuna wisma dan 32.300 orang penghuni lapas dan rutan, dari sebelumnya 86,4 juta jiwa pada tahun 2014.

b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan dengan penguatan 3 rumah sakit rujukan nasional dan 37 rumah sakit rujukan regional.

c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka percepatan pencapaian target

MDGs difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di 64 kab/kota sasaran MDGs melalui penguatan 125 RSU Daerah dengan prioritas utama peningkatan sarana prasarana sesuai standar pada layanan Unit Gawat Darurat (UTD), *Intensive Care Unit* (ICU), Unit Transfusi Darah (UTD)/ Bank Darah RS (BDRS), Tempat Tidur (TT) kelas III RS dan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK).

3. PEMBANGUNAN PERUMAHAN, AIR MINUM DAN SANITASI

Sasaran

Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh dan akses universal untuk air minum dan sanitasi.

Pada tahun 2015, fasilitasi penyediaan hunian layak direncanakan akan dilakukan upaya penyediaan hunian layak untuk 205.000 rumah tangga berpenghasilan rendah, tercapainya peningkatan akses air minum yang aman untuk 5% rumah tangga dan tercapainya peningkatan akses sanitasi yang layak untuk 4% rumah tangga.

Strategi Perkuatan

Perkuatan penyediaan hunian layak beserta prasarana, sarana dan utilitas di tahun 2015 akan diupayakan melalui strategi yang ditujukan untuk mencapai sasaran antara lain:

a. Tambahan fasilitasi penyediaan hunian layak untuk 60.000 rumah tangga berpendapatan rendah dan penanganan kawasan permukiman kumuh untuk 1.300 Ha. Fasilitasi penyediaan hunian layak tersebut dilakukan melalui pembangunan rusunawa sebanyak 3.600 sarusun untuk nelayan dan pekerja; revitalisasi rusunawa terbengkalai di 10 lokasi; pembangunan rumah khusus sebanyak 1.580 unit; fasilitasi uang muka kepada 55.000 rumah tangga berpendapatan rendah; serta pencadangan lahan untuk perumahan;

b. Penambahan penyediaan hunian layak untuk TNI dan Polri beserta sarana dan prasarana pendukungnya;

c. Percepatan pencapaian universal akses air minum melalui tambahan penyediaan akses air minum untuk

10,3 juta rumah tangga. Tambahan akses air minum tersebut dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional, SPAM Perkotaan, SPAM Berbasis Masyarakat dan SPAM di kawasan khusus.

d. Percepatan pencapaian universal akses sanitasi melalui tambahan penyediaan akses sanitasi untuk 2,3 juta rumah tangga. Tambahan akses sanitasi tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur air limbah terpusat/kawasan/komunal, pembangunan/peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta pembangunan/peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

B. PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

1. PERKUATAN KEDAULATAN PANGAN

Sasaran

Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri. Produksi pangan utamanya padi ditingkatkan dalam rangka swasembada agar kemandirian dapat dijaga. Adapun jagung akan terus ditingkatkan produksinya untuk pemenuhan pangan lokal dan pakan. Sementara untuk produksi kedelai, gula dan daging sapi perlu diperkuat untuk mengamankan konsumsi rumah tangga. Langkah perkuatan aspek produksi ini didukung pula oleh terbangunnya dan meningkatnya layanan jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah.

Pada tahun 2015 direncanakan peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri yaitu produksi padi 73,4 juta ton; kedelai 1,3 juta ton; jagung 20,3 juta ton; gula 2,97 juta ton; daging sapi 466,1 ribu ton; ikan 13,6 juta ton serta garam 3,3 juta ton dan umbi – umbian dan bahan pangan lainnya. Selain itu untuk mendukung kedaulatan pangan, direncanakan pembangunan 27 waduk dan revitalisasi 2 waduk, serta pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 100,9 ribu hektar, pembangunan/peningkatan reklamasi rawa seluas 16,2 ribu hektar, dan pembangunan/peningkatan tata air tambak seluas 3,4 ribu hektar. Untuk menjaga keandalan jaringan irigasi, pada tahun 2015 direncanakan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 182,1 ribu hektar, reklamasi rawa seluas 66,5

ribu hektar, dan rehabilitasi tata air tambak seluas 8,2 ribu hektar.

Strategi Perkuatan

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, perkuatan yang di tekankan untuk mencapai sasaran antara lain pada :

a. Peningkatan produksi: beras, jagung, kedelai, garam, umbi-umbian dan bahan pangan pokok lainnya melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dengan tambahan sasaran 530 ribu ha sehingga mencapai 730 ribu ha ditahun 2015;
b. Penyediaan pupuk dan benih untuk peningkatan produksi padi dan jagung yang sedianya hanya untuk Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) seluas 885 ribu ha, rencananya diperluas 4 juta ha diluar lokasi PTT;
c. Peningkatan produksi kedelai melalui percepatan optimasi Perluasan Areal Tanam untuk Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) seluas 300 ribu ha;
d. Peningkatan produksi ikan untuk mencapai 13,6 juta ton yang ditekankan pada perbaikan kualitas produksi;
e. Peningkatan produksi gula melalui penyediaan benih tebu untuk seluas 12 ribu ha;
f. Peningkatan produksi ternak melalui inseminasi buatan sebanyak 2 juta akseptor dan penyediaan bibit 1. 200 ekor dan indukan 30 ribu ekor;
g. Pengembangan tanaman hortikultura, khususnya cabai di 33 provinsi dan bawang merah di 25 provinsi;
h. Pembangunan technopark di kabupaten/kota sebanyak 10 berbasis pertanian, peternakan, 11 technopark berbasis kelautan dan perikanan serta pembangunan science park di Provinsi sebagai penyedia pengetahuan dan solusi teknologi serta pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut;
i. Penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung produksi dan pasca panen sebanyak 49.200 unit;
j. Mitigasi dan gangguan melalui pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan dampak perubahan iklim di 32 provinsi;
k. Pendampingan produksi baik oleh penyuluh, TNI – AD, dan mahasiswa serta koordinasi pelaksanaan;
l. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi pada

Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dengan tambahan sasaran 66,4 ribu hektar sehingga mencapai 167,3 ribu hektar. Tambahan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi rawa dengan sasaran seluas 4,8 ribu hektar sehingga mencapai 21 ribu hektar, serta tambahan pembangunan/peningkatan jaringan tata air tambak dengan sasaran seluas 4,8 ribu hektar sehingga mencapai 8,2 ribu hektar di tahun 2015.

m. Rehabilitasi jaringan irigasi pada Daerah Irigasi Kewenangan Pusat dengan tambahan sasaran 238,8 ribu hektar sehingga mencapai 420,9 ribu hektar. Tambahan rehabilitasi jaringan reklamasi rawa dengan sasaran seluas 30 ribu hektar sehingga mencapai 96,5 ribu hektar, serta tambahan rehabilitasi jaringan tata air tambak dengan sasaran seluas 5,7 ribu hektar sehingga mencapai 13,9 ribu hektar di tahun 2015;
n. Perkuatan dukungan terhadap peningkatan produksi pangan terutama padi, jagung, dan kedelai: melalui kegiatan (i) rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi tersier 700 ribu ha; (ii) pengembangan air tanah dangkal, air permukaan, embung, dan DAM parit 23 ribu unit; serta (iii) pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani 9.400 km;
o. Tambahan pembangunan waduk dengan sasaran 2 waduk baru dan percepatan pembangunan 3 waduk yang telah berjalan serta tambahan revitalisasi 1 waduk sehingga mencapai 3 waduk di tahun 2015.

2. PERKUATAN KEDAULATAN ENERGI

Sasaran

Sesuai sasaran RPJMN 2015 – 2019, guna mencapai sasaran rasio elektrifikasi 96,6% pada tahun 2019. Sasaran untuk tahun 2015 adalah meningkatnya aksesibilitas energi untuk mendukung perekonomian nasional dan akses energi bagi masyarakat melalui pemenuhan rasio elektrifikasi mencapai 85,15% melalui pembangunan pembangkit listrik berikut jaringan penyalurannya, serta memfasilitasi pembangunan pembangkit listrik dan jaringan penyalurannya yang dilaksanakan oleh BUMN.

Sasaran pembangunan ketenagalistrikan juga akan diikuti oleh upaya guna mencapai sasaran meningkatnya produksi energi baru terbarukan, seperti pemanfaatan energi hidro, surya, angin/bayu, biomasa dan BBN (bahan bakar nabati).

Adapun untuk peningkatan infrastruktur energi perlu pula adanya melanjutkan upaya konversi minyak ke gas terutama untuk masyarakat termasuk nelayan, industri dan transportasi.

Strategi Perkuatan

Untuk mencapai kedaulatan energi, maka di tahun 2015 akan dilakukan perkuatan terutama untuk meningkatkan kapasitas terpasang antara lain:

a. Tambahan konversi mitan ke LPG 3 kg sebanyak 2.050.000 paket;

b. Pelaksanaan *pilot project* konversi BBM ke Bahan Bakar Gas/BBG untuk nelayan sebanyak 50.000 paket;

c. Pembangunan sarana BBG untuk transportasi;

d. Penyiapan lahan untuk pembangunan kilang *LNG-LCNG Station;*

e. Pembangunan listrik perdesaan melalui pembangunan jaringan distribusi 718,40 kms, gardu distribusi 14,75 MVA, penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan dan rakyat tidak mampu sebanyak 28.066 RTS/Rumah Tangga Sasaran;

f. Pembangunan PLTD Hybrid pada daerah terpencil dan pulau terluar (PLTD Hybrid di 47 lokasi dengan total kapasitas 59,35 MW);

g. Tambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik mikrohidro (PLTMH) 4 unit;

h. Tambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga bayu (PLT-Bayu) 2 unit;

i. Tambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat 11 unit;

j. Pembangunan pilot unit pengolahan BBM sintetis 1 unit;

k. Pembangunan biogas komunal sebanyak 15 unit;

l. Pelaksanaan implementasi fuel blending untuk biodiesel dan bioethanol sebanyak 13 unit di 3 lokasi.

m. Fasilitasi pembangunan pembangkit listrik berikut jaringan penyalurannya yang dilaksanakan oleh BUMN.

3. PENGEMBANGAN EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN

Sasaran

Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir dan pulau – pulau kecil pada khususnya serta peningkatan pelayanan laut untuk mewujudkan konektivitas laut dan/atau antar pulau.

Pada tahun 2015 akan difokuskan pada peningkatan pemanfaatan sumberdaya kelautan melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, peningkatan produksi kelautan dan perikanan, penguatan pemberantasan *illegal, unreported dan unregulated* (IUU *fishing*), rehabilitasi kawasan pesisir, pengelolaan kawasan konservasi perairan, peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar; peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan; dan pembangunan sarana prasarana penghubung antar laut dan pulau atau Tol Laut dalam rangka membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan.

Strategi Perkuatan

Untuk mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan, maka tahun 2015 akan dilakukan perkuatan untuk mencapai sasaran utama antara lain:

a. Pengembangan armada perikanan tangkap 30 GT di wilayah perbatasan sebanyak 25 unit di tahun 2015;

b. Pemenuhan kebutuhan converter BBM ke LPG dengan tambahan sasaran 2.000 unit sehingga mencapai 2.750 unit di tahun 2015;

c. Pembangunan sentra perikanan dan sistem informasi nelayan sebanyak 30 sentra perikanan di tahun 2015;

d. Penambahan 2 kapal pengawas sehingga mencapai 6 kapal pengawas serta sarana prasarana pengawasan lainnya di tahun 2015;

e. Peningkatan hari operasi kapal pengawas sebanyak 94 hari sehingga mencapai minimal 280 hari;

f. Penyediaan 22 unit *cold storage* di sentra perikanan dalam rangka pengembangan sistem logistik ikan untuk stabilisasi harga ikan, dan pengembangan gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil perikanan;

g. Peningkatan rehabilitasi kawasan pesisir melalui penambahan penanaman bakau (vegetasi pantai) sebanyak 1,3 juta batang sehingga mencapai 3 juta batang, pembangunan sabuk pantai dengan penambahan sepanjang 3,2 Km sehingga mencapai 4,8 Km, dan pembangunan rekayasa hybrid dengan penambahan sepanjang 14,65 Km sehingga menjadi 17,4 Km, dan peningkatan ketangguhan 22 kawasan pesisir; serta pengelolaan kawasan konservasi perairan;

h. Pengkajian *stock* sumber daya ikan serta peningkatan sarana dan prasarana litbang iptek kelautan dan perikanan;

i. Peningkatan kemandirian pembudidaya ikan melalui pengembangan rumput laut di 4 sentra produksi rumput laut (meliputi 10 kawasan), penjaminan mutu benih, pengembangan unit perbenihan; penerapan cara budidaya ikan yang baik dan pengembangan teknologi *biofloc*; dan pengembangan sarana prasarana perikanan budidaya laut;

j. Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di 20 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana; penyusunan masterplan pulau-pulau kecil terluar dengan penambahan sebanyak 10 lokasi sehingga menjadi 12 lokasi; penyusunan tata ruang/zonasi kawasan strategi nasional di tahun 2015, serta peningkatan kualitas garam rakyat menuju swasembada garam industri di 2015;

k. Peningkatan penerapan cara karantina ikan yang baik dengan penambahan 115 UUPI sehingga menjadi 125 UUPI; dan peningkatan sertifikasi sistem jaminan mutu, serta penambahan pemetaan penyebaran penyakit ikan karantina sebanyak 92 lokasi sehingga menjadi 184 lokasi di tahun 2015;

l. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui pendidikan (khususnya pada Akademi Perikanan/Politeknik dan Sekolah Umum Perikanan Menengah), pelatihan dan penyuluhan.

m. Pengadaan dan pembangunan tahap I berbagai jenis kapal (termasuk kapal patrol dan kenavigasian) sebanyak 30 kapal sebagai tambahan kapal patroli dan navigasi yang pada saat ini jumlahnya mencapai 427 kapal.

n. Pengembangan pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut sebanyak 6 pelabuhan di Indonesia Timur.

o. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan sebagai pelabuhan pengumpan tol laut di 77 lokasi terutama di Indonesia Timur.

p. Pembangunan dermaga penyeberangan yang meliputi pembangunan baru, lanjutan, peningkatan, dan rehabilitasi di 65 lokasi di tahun 2015.

4. PENINGKATAN DAYA SAING PARIWISATA

Sasaran

Pembangunan destinasi pariwisata dan peningkatan pemasaran pariwisata untuk meningkatkan daya tarki daerah tujuan wisata dan mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan wisatawam nusantara.

Pada tahun 2015 direncanakan target wisatawan nusantara menjadi 259 juta kunjungan, wisatawan asing 11,2 juta orang, dan devisa dari sektor pariwisata sebanyak 12,5 Miliar USD.

Strategi Perkuatan

Untuk meningkatkan daya saing pariwisata maka di tahun 2015 akan dilakukan langkah perkuatan dengan (i) pengembangan kawasan ekowisata maritim dengan pembangunan 4 titik labuh yacht, (ii) pengembangan ekowisata sungai di Kalimantan dengan 2 dermaga, dan (iii) pengembangan 10 lokasi kawasan percontohan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata.

5. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

Sasaran

Peningkatan kontribusi sektor industri dalam PDB dengan meningkatkan pertumbuhan sektor industri skala besar dan menengah.

Pada tahun 2015 direncanakan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dalam PDB menjadi 20,8% dan target pertumbuhan industri pengolahan sebesar 6,1%.

Strategi Perkuatan

Untuk mencapai sasaran, maka di tahun 2015 akan dilakukan langkah perkuatan terutama dengan memulai tahap awal pengembangan kawasan industri diluar pulau Jawa yang terintegrasi baik sarana maupun prasarananya sebanyak 13 kawasan industri mencakup: (i) Bintuni – Papua Barat; (ii) Buli – Halmahera Timur – Maluku Utara; (iii) Bitung – Sulawesi Utara ; (iv) Palu – Sulawesi Tengah; (v) Morowali – Sulawesi tengah; (vi) Konawe – Sulawesi Tenggara; (vii) Bantaeng – Sulawesi Selatan; (viii) Batulicin – Kalimantan Selatan; (ix) Ketapang – Kalimantan Barat; (x) Landak – Kalimantan Barat; (xi) Kuala Tanjung – Sumatera Utara; (xii) Sei Mangke – Sumatera Utara; dan (xiii) Tanggamus – Lampung. Selanjutnya di dalam mendukung penguatan agroindustri, maka diperlukan peningkatan produksi pertanian berkelanjutan khususnya kakao di 9 provinsi sebagai bahan baku industri dan berpotensi untuk ditingkatkan mutu dan volume ekspornya. Selain itu akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung penguatan industri nasional antara lain dengan diselesaikannya pembangunan jalan tol akses ke pelabuhan priok untuk mengurangi biaya logistik.

Selain itu, untuk mendorong berkembangnya industri manufaktur di Indonesia, akan dilakukan penyederhanaan dan peningkatan kualitas layanan perijinan investasi melalui pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu – tingkat Pusat (PTSP-Pusat) yang menyatukan perijinan tingkat pusat pada satu tempat layanan perijinan dengan prosedur perijinan yang transparan.

C. PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

1. ANTAR KELAS PENDAPATAN

Sasaran

- Menciptakan pertumbuhan yang inklusif melalui pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang menyeluruh, dengan menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap pelayanan dasar dan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi;
- Meningkatnya kualitas dan daya saing tenaga kerja serta akses terhadap kegiatan ekonomi produktif bagi tenaga kerja rentan.

Pelaksanaan di tahun 2015 direncanakan untuk mencapai angka kemiskinan 9,5-10,5 % melalui pemberian perlindungan sosial terintegrasi dan akses pengembangan ketrampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi kepada petani, nelayan, buruh dan usaha kecil/mikro.

Strategi Perkuatan

Pada tahun 2015 direncanakan untuk dilakukan perkuatan untuk mencapai sasaran antara lain:

a. Pemberian Kartu Keluarga Sejahtera dengan penambahan sasaran 340.000 jiwa, dari yang semula 15.530.897 jiwa, hingga mencapai 15.870.897 jiwa pada tahun 2015.

b. Perbaikan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang mencakup pemutakhiran dan validasi data.

c. Pegembangan kelompok usaha bersama bagi penduduk kurang mampu termasuk usaha padat karya produktif.

d. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar.

e. Penerapan Sistem Pelatihan Kerja yang menterpadukan pengembangan standar kompetensi dengan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi melalui 32 ribu orang pelatihan berbasis kompetensi dan 35 ribu sertifikasi untuk sektor logistik, agro industri, perikanan, produk tekstil, jasa penerbangan, jasa kesehatan, pariwisata, karet, kayu, otomotif, dan elektronika.

f. Peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga berbasis pemberdayaan masyarakat.

g. Peningkatan penghidupan berkelanjutan bagi usaha mikro

h. Pemberdayaan nelayan dalam mendukung sekaya maritim.

i. Pemberian akses untuk pengembangan ketrampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi.

j. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM Perhubungan melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi di sektor transportasi untuk mengurangi kesenjangan pada 10 wilayah serta pengadaan kapal latih Multi Purpose sebanyak 6 unit dan pengadaan pesawat latih sebanyak 51 unit dan suku cadang secara multiyears.

2. ANTAR WILAYAH

Sasaran

Pembangunan yang inklusif dan komprehensif yang tidak hanya dipusatkan pada pembangunan pusat – pusat ekonomi beserta infrastruktur, transportasi, dan sarana – prasarana pendukung lainnya di wilayah barat namun juga diwilayah timur. Serta membangun wilayah perdesaan, daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan.

Untuk mendukung peningkatan konektivitas nasional, pada tahun 2015 direncanakan pembangunan infrastruktur jalan yang meliputi jalan baru sepanjang 616,75 Km, jalan bebas hambatan sepanjang 125 Km, peningkatan kapasitas/pelebaran jalan nasional sepanjang 3.869,74 Km, membangun wilayah perdesaan, membangun sarana prasarana ekonomi, mempercepat pengembangan wilayah Suramadu, serta membangun infrastruktur dan transportasi mendukung wilayah perbatasan, khususnya di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur.

Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan di seluruh wilayah Indonesia untuk memperlancar arus distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis, yang dapat mengurangi ketimpangan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang strategis.

Strategi Perkuatan

Pada tahun 2015 direncanakan untuk dilakukan perkuatan untuk mencapai sasaran antara lain:

a. Penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa melalui rekrutmen dan pelatihan fasilitator dan pendampingan desa, serta pelaksanaan pendampingan desa di 74.045 desa, dalam rangka implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;

b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang mencakup pembangunan pelayanan dasar pendidikan,

kesehatan, permukiman, jaringan listrik, dan sarana prasarana transportasi desa;

c. Pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan konektivitas nasional dan mengurangi kesenjangan wilayah dengan tambahan sasaran 1.268,72 Km jalan sehingga mencapai 6.037,98 Km pada tahun 2015, serta tambahan untuk pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang 21,1 Km sehingga mencapai 125,01 Km di tahun 2015.

d. Pembangunan jalan di wilayah perbatasan terutama di wilayah Kalimantan dan NTT dengan tambahan sasaran sepanjang 300,1 Km sehingga mencapai 390,66 Km di tahun 2015.

e. Penanganan jalan melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan pembangunan jalan baru yang diprioritaskan pada peningkatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat, serta untuk mengurangi kesenjangan pada daerah tertinggal, daerah perbatasan dan daerah pesisir kepulauan.

f. Pembangunan pengembangan 8 bandara untuk dapat didarati oleh pesawat tipe boeing 737 series serta pembangunan dan pengembangan bandara serta fasilitas penunjang termasuk di 34 lokasi termasuk dalam pada wilayah terdalam, terluar dan perbatasan.;

g. Peningkatan operasi pengamanan dan keselamatan wilayah laut di perairan perbatasan;

h. Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan tambahan pembangunan 100 pasar melalui dana pemerintah Pusat dan 128 pasar didanai dari DAK, yang sebagiannya akan dialokasikan di daerah tertinggal dan lokasi prioritas perbatasan negara. Sehingga secara total akan terbangun 1000 pasar rakyat di tahun 2015.

i. Pembangunan jalan Akses pelabuhan dengan penambahan pembangunan jalan akses sepanjang 157 Km antara lain di Sorong, Kuala Tanjung, dan Maloy sehingga di tahun 2015 terbangun jalan akses di pelabuhan sepanjang 167 km;

j. Pembangunan Infrastruktur Perkeretaapian di Luar Jawa terutama di Lintas Sumatera (Besitang-Binjai, Solok-Muaro Kalaban-Muaro, Prabu Mulih - Kertapati), Lintas Sulawesi (Makasar-Pare-pare), serta Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa (Kroya-Kutoarjo, Solo-Paron-Madiun, Madiun-Mojokerto-Wonokromo), pengadaan sarana kereta api perintis untuk lintas Sumatera dan Sulawesi, penyelesaian DED dan Persiapan Jalur KA Trans Papua dan Kalimatan serta ruas-ruas lainnya di Luar Jawa, serta proses pengadaan lahan yang diperlukan dengan tambahan sasaran panjang jalur kereta api mencapai 400 km ditahun 2015;

k. Percepatan pengembangan Wilayah Suramadu dengan melakukan pembangunan infrastruktur pendukung di 12 klaster ekonomi meliputi sektor pertanian, perikanan dan kelautan, industri kecil menengah dan pariwisata; membangun 14 unit infrastruktur permukiman dan lansekap, serta mengembangkan sentra (pusat model) pengolahan, pemasaran dan promosi produk unggulan dan seni budaya di Wilayah Suramadu.

l. Pengembangan model pusat informasi dan promosi sektor unggulan dan seni budaya serta Infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil produksi di Wilayah Suramadu, serta membangun infrastruktur di 12 Klaster/kawasan serta membangun 14 unit infrastruktur permukiman dan lansekap.

m. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus yang dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu melalui tambahan pengadaan 1.000 unit bis yang akan didistribusikan di 28 kota;

D. PERKUATAN DIMENSI LAINNYA (KONDISI PERLU)

1. KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM

a. Pembangunan Rumah Penyimpanan Barang Rampasan Negara Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) percontohan di Jakarta Barat dan pembangunan infrastruktur untuk pelaksanaan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana anak berupa pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Tangerang;

		b. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang RUPBASAN pada 20 UPT RUPBASAN.
2.	**TATA KELOLA DAN REFORMASI BIROKRASI**	a. Memperkuat implementasi dari Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Dukungan peningkatan penerimaan negara; c. Dukungan pelaksanaan tugas fungsi kemaritiman.

E. *QUICK WINS* DAN PROGRAM LANJUTAN

a. Penyelenggaraan Asian Games 2018 terutama untuk pembinaan atlit;

b. Dukungan penyelenggaraan konferensi internasional;

c. Peningkatan kualitas/pemulihan kesehatan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan rehabilitasi hutan lindung pada DAS Ciliwung dan DAS Citarum.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,

Ratih Nurdiati

SUPLEMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH
TAHUN 2015